

DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN OLEH PT. CIPTA BANGUN NUSANTARA (CBN) DI DESA ULUBELU, KECAMATAN GOLEWA, KABUPATEN NGADA¹Ermelinda Ngeni, ²Konfridus Roynaldus Buku^{1,2}Program Studi Ilmu Sosiatri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula, Ende-Indonesia**Corresponding Email:** konfridusbuku@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 05 Agustus 2025; Disetujui: 05 Agustus 2025 ; Diterbitkan: 05 Agustus 2025

Abstrak

Pembangunan jalan merupakan sebuah proyek infrastruktur yang tidak hanya mengubah tampilan fisik, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial masyarakat dalam proses pembangunan jalan yang dilakukan oleh PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN), khususnya terkait interaksi sosial, perubahan struktur kekuasaan dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan fisik. Studi ini dilakukan di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, meliputi observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memicu perubahan dalam pola interaksi masyarakat, baik antar individu maupun kelompok, serta menciptakan perubahan dalam struktur kekuasaan lokal. Hasil penelitian ini juga mengungkap adanya dampak negatif seperti konflik terkait kepemilikan lahan, akses terhadap sumber daya, dan perubahan pola hidup masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perencanaan pembangunan jalan yang berkelanjutan, dengan menekankan perlunya partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan dampaknya terhadap dinamika sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial pembangunan infrastruktur jalan di desa, serta memberikan rekomendasi bagi perencanaan dan implementasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur Jalan, Dinamika Sosial, Interaksi Sosial, Konflik Sosial**Abstract**

Road construction is not merely a physical infrastructure project; it also significantly impacts the social dynamics of local communities. This study aims to analyze the social dynamics within the community during the road construction process carried out by PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN), particularly focusing on social interactions, shifts in power structures, and community adaptation to physical environmental changes. The research was conducted in Ulubelu Village, Golewa Sub-district, Ngada Regency, using a descriptive qualitative method, including observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that road infrastructure development has led to changes in social interaction patterns, both among individuals and community groups, as well as shifts in local power structures. The study also uncovers several negative impacts, such as conflicts over land ownership, access to resources, and changes in community lifestyles. These findings underscore the importance of sustainable road development planning that includes community participation and considers the social impacts of such projects. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the social impacts of rural infrastructure development and provide recommendations for more inclusive and sustainable planning and implementation.

Keywords: Road Infrastructure Development, Social Dynamics, Social Interaction, Social conflict

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (UUD 1945) yang telah dicanangkan sejak masa kemerdekaan hingga sekarang. Pembangunan secara umum bermakna sebagai proses yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan merupakan perubahan untuk pemenuhan kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas hidup (Anwas, 2014:41). Untuk mencapai tujuan itu maka pembangunan harus meliputi semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan maupun pertahanan keamanan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat, maka masyarakat telah dilibatkan secara aktif untuk membangun kesejahtraannya dan kesejahteraan negaranya (Utami, 2019:18). Hal ini sesuai dengan hakikat pembangunan daerah yang menekankan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian, masyarakat sebagai subjek dilibatkan sejak awal pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pembangunan tersebut terselesaikan dan dapat dinikmati hasilnya.

Seiring dengan perkembangan pembangunan, muncul berbagai ketimpangan sosial. Ketimpangan atau masalah-masalah ini sangat kompleks, mulai dari persoalan konflik, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, persoalan hukum dan masalah infrastruktur. Berkaitan dengan infrastruktur tentu menjadi suatu perhatian khusus karena di era globalisasi ini, perkembangan suatu wilayah dapat diukur dari infrastrukturnya. Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan nasional. Selain itu, infrastruktur juga merupakan kontributor yang signifikan terhadap ekspansi ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang merupakan fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara atau daerah. Infrastruktur dalam hal ini merupakan landasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Solekhan, 2014:70).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), infrastruktur merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Dalam konteks pembangunan sosial, infrastruktur atau prasarana yang paling menonjol adalah pembangunan sarana fisik. Pembangunan sarana fisik didefinisikan sebagai pembuatan alat atau sarana yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, dan bangunan lainnya, pasar dan bangunan lain yang mendukung pemasaran, infrastruktur sosial berupa lembaga pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas kesehatan serta prasarana produksi jalur air (Ulyani, 2013:19).

Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada adalah salah satu desa sasaran dalam proyek pengembangan PLTP Daratei yang pengerjaannya mulai dilakukan sejak tahun 2022 sampai saat ini. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Daratei merupakan

pembangunan infrastruktur kelistrikan yang termasuk dalam program 35 ribu MW. Proyek ini berkapasitas 2 x 10 MW dan terletak di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, NTT. Pembangunan PLTP Daratei juga merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan peran EBT (Energi Baru Terbarukan) pada bauran energi nasional yang ditargetkan mencapai 23 persen pada tahun 2025 dan juga merupakan upaya untuk mendukung *Net-Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 (*radarlombok.co.id*, diakses 24 Januari 2025).

Salah satu progres pembangunan saat ini yang merupakan dampak dari proyek PLTP Daratei bagi masyarakat setempat adalah pelebaran dan pembangunan ruas jalan baru menuju lokasi pengembangan. Ruas jalan aspal yang dibangun berjarak 4 kilometer dimulai dari jalur utama (jalan negara) melewati Desa Ulubelu, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan jalan baru dari Dusun Poma Mana Desa Wogo menuju lokasi pembangunan. Jenis-jenis pembangunan yang dilakukan mulai dari penggusuran jalan, pengaspalan, pembangunan drainase sampai pada pembangunan jembatan kecil. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata PT. PLN (Persero) melalui PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN) tidak hanya hadir dalam pembangunan infrastruktur kelistrikannya sebagai sumber energi tetapi terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembangunan jalan yang saat ini dinikmati oleh warga sekitar kawasan pembangunan (*Majalah Online SwaraNTT.Net*, diakses 22 Januari 2025).

Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN) ternyata juga mengalami beberapa persoalan. Persoalan ini terjadi karena tidak semua masyarakat pro terhadap proses pembangunan yang dilakukan. Walaupun pembangunan itu memberikan manfaat positif namun masih ada kelompok masyarakat yang menolak dan melakukan aksi protes kepada pemerintah desa dan pihak kontraktor yang bekerja.

Berdasarkan situasi ini, dapat dijelaskan bahwa bentuk dinamika sosial dalam pembangunan jalan terlihat dari perubahan sikap masyarakat terhadap proyek tersebut. Pada awalnya, masyarakat mendukung proyek ini. Namun, ketika pembangunan mulai memasuki area lahan warga, muncul bentuk penolakan dari beberapa pemilik lahan. Penolakan ini kemudian memicu konflik, karena terdapat pertentangan antara kepentingan pembangunan dan hak atas kepemilikan lahan. Konflik ini berdampak pada terhentinya sementara proses pengerjaan jalan selama satu minggu. Situasi ini pada akhirnya telah mengganggu kehidupan sosial masyarakat setempat sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan fokus pada dinamika sosial masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan oleh PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN) di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.

Untuk memperoleh hasil penelitian secara tepat, maka peneliti fokus pada masalah yang ditetapkan yaitu faktor penghambat partisipasi Kelompok Wanita Tani Melati di Desa Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Dilihat dari permasalahan di atas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah melihat faktor-faktor penghambat partisipasi Kelompok Wanita Tani Melati.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori Teori konflik Ralf Dahrendorf, Menurut Dahrendorf, masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dengan kepentingan berbeda yang saling berupaya mendominasi satu sama lain demi memenuhi kepentingan masing-masing. Konflik dianggap sebagai bagian alami dari sistem sosial yang muncul melalui relasi-relasi sosial yang terhubung dalam suatu struktur. Ketidaksetaraan, dominasi, dan eksploitasi kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya menjadi pemicu utama munculnya konflik, sebagaimana dijelaskan pula oleh Boutillier dkk bahwa konflik inheren dalam relasi yang timpang antara mereka yang memiliki akses kemudahan dan yang tidak.

Dalam konteks penelitian ini, konflik yang terjadi di masyarakat Desa Ulubelu berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara warga, pemerintah desa, dan pelaksana proyek pengembangan PLTP Daratei. Proyek pembangunan jalan yang seharusnya menjadi sarana pembangunan justru memicu ketegangan sosial karena adanya benturan kepentingan. Perbedaan pandangan, kurangnya komunikasi partisipatif, serta dominasi kepentingan pihak tertentu menyebabkan munculnya dinamika sosial berupa penolakan, ketegangan, hingga perundingan di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks ketimpangan dan relasi kuasa yang timpang dalam proses pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika sosial masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan oleh PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN) di Desa Ulubelu. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup masyarakat Desa Ulubelu, pemerintah desa, dan pihak CBN. Peneliti melibatkan 10 narasumber, terdiri dari perangkat desa, perwakilan pihak CBN, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif dan nonpartisipatif, serta dokumentasi berupa foto dan arsip terkait pembangunan. Semua data diklasifikasikan dalam skema data untuk menggambarkan profil desa dan dinamika sosial yang terjadi selama pembangunan jalan.

Teknik analisis data mengikuti model Miles & Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting, sedangkan penyajian data disusun secara naratif dan visual guna memperjelas temuan. Kesimpulan awal diuji ulang melalui verifikasi terhadap data di lapangan. Penelitian ini berlangsung di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada selama tujuh bulan, dari Januari hingga Juli 2025. Dengan metode ini, peneliti diharapkan dapat menghasilkan

gambaran menyeluruh mengenai interaksi sosial masyarakat dan dampaknya terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Terjadinya Penolakan

Secara umum penolakan adalah suatu bentuk dinamika sosial dimana masyarakat menolak perubahan atau inovasi yang diusulkan. Penolakan terhadap suatu perubahan dapat berdampak negatif pada masyarakat, karena dapat menghambat kemajuan, menciptakan konflik dan bahkan memperburuk situasi sosial. Dalam konteks pembangunan jalan di Desa Ulubelu dapat dijelaskan bahwa ada sebagian kelompok masyarakat yang melakukan aksi penolakan akibat ketidaksepemahaman antara para pekerja dan masyarakat. Hasil wawancara dengan narasumber menjelaskan bahwa ada aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat karena pembangunan yang dilakukan sedikit menyimpang dari apa yang diharapkan. Namun sebagian masyarakat lainnya justru sangat antusias dan senang dengan adanya pembangunan jalan ini. Secara konsep sebenarnya pembangunan jalan yang dilakukan adalah suatu proses kegiatan untuk mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik (Heliatra, 2019:2).

Namun keadaan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa teknis pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan. Terjadi mis-komunikasi dalam prosesnya sehingga ada ketidakpuasan dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan. Hal ini sepadan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Francis (2006:143) yang menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik salah satunya karena dipengaruhi oleh komunikasi. Komunikasi merujuk pada suatu sikap dimana jika terjadi salah pengertian yang berkenaan dengan informasi yang tidak lengkap maka akan berpotensi menimbulkan konflik.

Sementara itu dari prespektif teori konflik menurut Ralf Dahrendorf dapat dijelaskan bahwa terjadinya penolakan terhadap proses pembangunan jalan disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan sosial. Perbedaan kepentingan yang dimaksudkan ini merujuk pada penolakan warga terhadap pembukaan jalan baru yang melewati lahan milik mereka akibat dari perbedaan pandangan dalam komunikasi sosial. Masyarakat menolak karena merasa tidak ada komunikasi yang terjadi sebelumnya sehingga proses pengerjaan jalan mengalami hambatan dan diistirahatkan selama 1 minggu.

Merujuk pada situasi di atas, peneliti melihat adanya kepentingan yang berbeda dalam tajuk bingkai dinamika bermasyarakat antara kelompok masyarakat dengan mereka yang melaksanakan proyek pelebaran dan pembukaan jalan baru menuju lokasi pengembangan PLTP. Penulis menyimpulkan bahwa setiap kepentingan itu saling berbenturan sehingga menimbulkan konflik. Namun, situasi yang terjadi ini tidak berdampak besar terhadap kelanjutan proses

pembangunan karena berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa ada upaya yang dilakukan baik dari pihak CBN selaku pelaksana proyek maupun dari pihak pemerintah Desa Ulubelu untuk menyelesaikan persoalan ini. Hasilnya menunjukkan hal yang positif karena masing-masing pihak akhirnya saling menerima dan memahami satu sama lain.

2. Terjadinya Pertentangan (Konflik)

Pertentangan atau konflik secara umum didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial dimana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat dan tujuan mereka. Konflik akan muncul melalui relasi- relasi sosial dalam sistem dan tidak melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Artinya konflik itu terjadi karena adanya perbedaan dan persamaan kepentingan sosial (Kolip, 2011:348).

Dalam konteks pembangunan jalan di Desa Ulubelu, dapat dijelaskan bahwa pertentangan atau konflik yang terjadi merupakan hasil dari adanya dinamika sosial dimana telah terjadi perubahan dalam masyarakat akibat interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksudkan disini adalah pola hubungan antara pihak CBN selaku pelaksana proyek dan masyarakat Desa Ulubelu. Dari data yang didapatkan, ternyata konflik yang terjadi adalah penolakan yang diikuti dengan aksi protes dari sekelompok warga yang notabene merupakan pemilik lahan yang rencananya akan ada pembukaan jalan baru melewati lahan tersebut.

Konflik warga Desa Ulubelu dapat dikategorikan sebagai konflik bukan penyimpangan, tetapi normal. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik sosial bukanlah sesuatu yang abnormal atau harus dihindari, melainkan bagian alami dan fungsional dari kehidupan sosial. Setiap masyarakat pasti memiliki kelompok dengan kepentingan berbeda yang bisa saling bertentangan. Dalam kondisi ini, Ralf Dahrendorf kembali menegaskan bahwa telah terjadi perbedaan kepentingan antara pihak pelaksana proyek dan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda sehingga peneliti menemukan suatu konsep bahwa konflik yang terjadi ini adalah akibat dari perbedaan kepentingan dalam komunikasi. Perbedaan ini terjadi ketika adanya ketidakselarasan atau pertentangan dalam tujuan, nilai, atau kebutuhan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Perbedaan kepentingan ini juga dapat mengganggu proses komunikasi, menciptakan ketegangan, dan bahkan menyebabkan pertengkaran atau perselisihan. Hal ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan. Masyarakat menolak pembangunan dilanjutkan karena merasa akan dirugikan sementara pihak pelaksana merasa melakukan pekerjaan sesuai prosedur. Pandangan yang berbeda inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pertentangan atau konflik.

Lebih lanjutnya, terjadinya pertentangan atau konflik ini menjadi konflik kepentingan karena disebabkan oleh adanya kepentingan tersembunyi. Awalnya diberitahukan bahwa akan

ada pembangunan jalan menuju lokasi pengembangan PLTP Daratei namun ada sebagian masyarakat kecil yang tidak diberitahu. Sebagian masyarakat juga tidak diberitahu bahwa jalur pembukaan jalan baru akan melewati beberapa lahan milik mereka. Masyarakat mulai menyadari adanya kejanggalan pembangunan proyek sehingga aksi protes yang bertajuk konfiikpun terjadi.

Konflik ini juga menyangkut dua dari lima konsep dasar dari Ralf Dahrendorf yaitu konflik menyebabkan perubahan dan perkembangan, serta konflik yang disertai dengan aksi. konflik yang terjadi menyebabkan adanya bagian-bagian kelompok. Kelompok yang pertama terbentuk adalah kelompok yang terlibat konflik. Dari konflik tersebut terbentuk kelompok kepentingan yang mencari keadilan dan kelompok yang melakukan aksi penolakan yaitu para kontraktor yang bekerja dan sekelompok masyarakat.

Merujuk pada penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi dalam proses pembangunan jalan di Desa Ulubelu merupakan bentuk nyata dari dinamika sosial akibat adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pihak pelaksana proyek. Masyarakat, khususnya pemilik lahan, menolak kelanjutan proyek karena merasa lahannya terdampak tanpa ada kejelasan ganti rugi atau kesepakatan yang memadai. Sementara itu, pihak pelaksana tetap berpegang pada agenda pembangunan yang telah direncanakan. Ketegangan ini mencerminkan adanya benturan kepentingan yang tidak terjembatani secara dialogis. Menurut teori konflik Ralf Dahrendorf, konflik sosial muncul sebagai akibat dari pertentangan antara pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda dalam suatu struktur sosial. Dalam kasus ini, konflik tidak muncul karena pertentangan kelas sosial, melainkan karena ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan distribusi informasi serta manfaat proyek. Ketika sebagian masyarakat merasa tidak dilibatkan atau dirugikan, maka munculah resistensi yang berkembang menjadi konflik terbuka. Dengan demikian, konflik ini dapat dipahami sebagai akibat dari relasi sosial yang timpang, di mana kepentingan masyarakat tidak mendapat ruang yang cukup dalam proses pembangunan.

3. Terjadinya Perundingan

Secara umum terjadinya perundingan seringkali diawali oleh konflik, perbedaan pendapat, atau kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu. Sementara itu perundingan dalam konteks negosiasi atau perjanjian, terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda, bersedia melakukan diskusi dan pertukaran ide untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan utama perundingan adalah mencapai mufakat atau konsensus yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Terjadinya perundingan dalam konteks pembangunan jalan di Desa Ulubelu dipicu oleh konflik antara sekelompok masyarakat dan pihak kontraktor yang bekerja. Konflik ini muncul karena sekelompok masyarakat menganggap kurang diikutsertakan dalam proses pengambilan

keputusan sehingga pembangunan jalan sempit dihentikan. Merujuk pada konteks masalah yang diteliti, dapat dijelaskan bahwa konflik perbedaan kepentingan yang terjadi sudah dan telah diatasi melalui proses perundingan. Perundingan menjadi penting untuk mencapai kesepakatan antara berbagai pihak yang berkepentingan. Perundingan yang baik harus melibatkan seluruh pihak yang terkait, dilakukan secara transparan dan partisipatif, serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Mediasi oleh pihak ketiga juga bisa menjadi cara untuk memfasilitasi perundingan dan mencapai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat dijelaskan bahwa setelah terjadinya konflik, pemerintah Desa Ulubelu langsung bergerak cepat untuk menyelesaikannya. Masing-masing pihak yang berkonflik diundang untuk hadir dalam pertemuan. Selain itu pemerintah desa juga mengundang beberapa pihak lain yang dalam hal ini turut membantu proses penyelesaian konflik diantaranya Babinsa, anggota Polsek Golewa, beberapa tokoh masyarakat dan Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Ulubelu. Hasil dari proses ini sangat positif karena masing-masing pihak akhirnya bisa saling memahami satu sama lain dan ada kesepakatan-kesepakatan yang di sepakati. Salah satu kesepakatan ini adalah berkaitan dengan proses pembangunan jalan yang akan dilanjutkan kembali dengan melakukan revisi jalur jalan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

Sementara itu dalam perspektif teori konflik, Dahrendorf melihat konflik sebagai dinamika sosial yang normal dan bahkan konstruktif, karena dapat memicu perubahan dan perkembangan masyarakat. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, kekuasaan, dan struktur sosial yang tidak seimbang. Konflik ini kemudian mendorong terjadinya perundingan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan atau perubahan dalam struktur tersebut. Pernyataan ini menggambarkan situasi yang tidak kondusif antara pemerintah, para pekerja proyek dan masyarakat yang lahannya akan dijadikan sebagai lokasi pembukaan jalan. Situasi ini kemudian mendorong terjadinya proses negosiasi sehingga benar adanya proses perundingan itu terjadi dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Ulubelu.

4. Penerimaan dari masyarakat

Konsep umum penerimaan dari masyarakat merupakan bentuk dari sebuah proses penafsiran terhadap suatu hal yang dapat ditolerir oleh masyarakat dengan alasan tertentu sehingga masyarakat dapat menerima sebuah fenomena baru. Fenomena baru yang dimaksudkan adalah proses pengerjaan jalan menuju lokasi pengembangan PLTP Mataloko yang di dalamnya ada proses dinamika sosial. Penerimaan masyarakat terhadap pembangunan jalan yang telah selesai dikerjakan merupakan bagian dari lanjutan dinamika sosial pasca konflik. Meskipun pada tahap awal sempat terjadi penolakan, khususnya dari pemilik lahan yang merasa dirugikan, masyarakat kemudian mulai memanfaatkan jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Perubahan

sikap ini menunjukkan adanya proses penyesuaian sosial di mana masyarakat mencoba berdamai dengan kondisi baru demi kepentingan bersama.

Dalam perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, konflik muncul akibat ketimpangan kepentingan antara pihak yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Konflik yang terjadi di Desa Ulubelu mencerminkan perlawanan dari masyarakat yang haknya tidak terakomodasi. Namun, setelah struktur sosial mulai berubah dengan mulai dirasakannya manfaat jalan maka muncul bentuk penerimaan sebagai tanda resolusi konflik sementara. Hal ini menegaskan bahwa konflik tidak bersifat permanen, melainkan bagian dari dinamika sosial yang terus bergerak menuju keseimbangan baru.

Data di lapangan menunjukkan hampir semua narasumber setuju dan menerima pembangunan jalan yang dikerjakan oleh PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN). Persepsi masyarakat Desa Ulubelu cenderung positif dimana masyarakat sangat mendukung dan memberikan persepsi positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan menuju lokasi pengembangan PLTP Daratei. Persepsi positif ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial seperti akses yang lebih mudah ke pusat pendidikan, kesehatan, pasar dan kebun. Peningkatan aktivitas ekonomi, seperti distribusi hasil panen dan barang dagangan.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa walaupun telah terjadi dinamika dalam prosesnya, tetap tidak mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menilai fenomena yang sedang terjadi. Masyarakat tetap mendukung dan menerima proyek pembangunan karena bagi mereka banyak hal positif yang telah diperoleh mulai dari akses jalan yang sudah baik, aset masyarakat disewa oleh para kontraktor, jasa tukang lokal juga diikutsertakan dalam proyek dan masih banyak lagi.

KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada oleh PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN) pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan ini diprakarsai oleh PT. PLN (Persero) dalam upaya mempercepat akses masuk menuju lokasi pengembangan PLTP Daratei. Pembangunan ini juga telah banyak memberikan dampak baik bagi masyarakat setempat walaupun terjadi dinamika sosial masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya.

Berkenaan dengan dinamika sosial masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan oleh PT. Cipta Bangun Nusantara (CBN) di Desa Ulubelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ulubelu bagi masyarakat merupakan sebuah media atau alat yang memberdayakan. Lewat pembangunan ini masyarakat sasaran

diarahkan, didampingi dan dibantu untuk mampu berproses secara aktif guna mengakses semua sumber daya yang dimiliki.

2. Berkenaan dengan fakta di lapangan, ternyata masih ada masyarakat yang belum mampu mengakses secara keseluruhan manfaat dari proses pembangunan yang dilakukan karena pembukaan jalan baru akan melewati lahan mereka. Hal ini kemudian memicu terjadinya dinamika sosial masyarakat dimana sekelompok masyarakat melakukan aksi protes dan penolakan pembangunan jalan dilanjutkan. Dalam konteks dinamika sosial ini, dijelaskan ada empat hal penting yang terjadi dalam prosesnya yaitu mulai dari adanya penolakan yang dalam hal ini telah terjadi aksi protes dan pemblokiran alat berat yang digunakan para kontraktor, terjadinya konflik dalam bentuk adu argumen dan dorongan-dorongan ringan, terjadinya perundingan dalam bentuk musyawarah bersama dan penerimaan dari masyarakat akan pembangunan jalan yang hasilnya sudah dinikmati saat ini. Semua hal ini adalah bagian dari dinamika sosial masyarakat dalam pembangunan jalan yang dilakukan.
3. Terkait dengan masalah ini, yang menjadi penyebabnya yaitu masalah mis-komunikasi antara pihak CBN dan masyarakat yang lahnya akan dilewati untuk pembukaan jalan baru. Masalah ini kemudian ditanggap cepat oleh pemerintah desa sehingga terjadinya proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan hasil kesepakatannya yaitu pembangunan jalan dilanjutkan kembali dengan tetap melewati lahan warga namun tidak pada jalur tengah dari lahan itu melainkan melewati pinggir dari tiap-tiap lahan. Adapun kesepakatan lainnya yaitu para pemilik lahan tetap akan diberikan upah atas tanah yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung. Bandung : Alfabeta
- Boutillier dkk. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Damsar, (2010). *Pengantar Sosiologi konflik*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset
- Diana,Francis. (2006). *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills
- Familoni. (2004). “*The Role of Economic and Social Infrastructure in Economic Development: A Global View*”
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka
-

Ilmu Group

- Heliatra.(2019). *Pembangunan Nasional Edisi Digital*. Semarang:Alprin Slamet Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group Nurdin. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi*. Aceh : Unimal Press Santoso
- S. (2016). *Dinamika Kelompok*. Jakarta : Bumi Aksara
- Setiadi dan Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Jakarta: Kencana
- Siti Asiah. (2017). *Manajemen Konflik (Teori dan Aplikasi)*. Gorontalo : Pustaka Cendekia
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukmadinata.(2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya Suyatna. (2005). *Manajemen Pemberdayaan: Konsep, Strategi dan Implementasi*.Bandung: Humaniora Utama Press
- Soekanto. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Solekhan. (2014). *Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Malang : Wisma Kalimetro
- Ufi Ulfiyah dkk, (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta:LAKPESDAM PBNU
- Ulyani, Grand. (2013). *Badan Penelitian dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman. (2004). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Utami.(2019). *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat*. Jawa Tengah:Desa Pustaka Indonesia
- Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK). 2022. Penelitian terdahulu oleh Justina Nurianti Purba (2008) tentang “Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun”.
- Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, 1997 UU No.38 Tahun 2004
- <https://radarlombok.co.id/pln-dan-pt-cipta-bangun-nusantara-mulai-pekerjaan-infrastruktur-pltp-mataloko.html>, diakses pada 24 Januari 2025
- <https://www.swarantt.net/pembangunan-proyek-geothermal-mataloko-warga-sebut-kampung-terisolir-mulai-menikmati-akses-jalan-mulus-hingga-perekonomian-semakin-membaik>, diakses pada 22 Januari 2025
-

<https://www.kompasiana.com/Peran Pedagogi Sosial dalam Dinamika Masyarakat>, diakses pada 28 Desember 2024

[https://www.pjarbelajar.id/blog/dinamika kelompok sosial](https://www.pjarbelajar.id/blog/dinamika_kelompok_sosial), diakses pada 24 Januari 2025

[https://e-journal.uajy.ac.id/pengertian infrastruktur](https://e-journal.uajy.ac.id/pengertian_infrastruktur), diakses pada 27 Desember 2024